

BAB VII

PLAFON APBD 2005

A. Plafon Pendapatan Daerah

Dalam menentukan besarnya rencana pendapatan daerah, langkah pertama yang dilakukan seperti yang dijelaskan pada bab III adalah melakukan kajian hasil perkiraan dari FE-UI dan BPS serta exercise mikro oleh Dinas Pendapatan Daerah Propinsi DKI Jakarta. Langkah pertama yang dilakukan adalah mengevaluasi hasil perkiraan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan menggunakan model ekonometrik. Simulasi PAD dilakukan karena pada kenyataannya PAD merupakan bagian terbesar dari pendapatan daerah. Dalam simulasi tersebut, variabel-variabel penjelas/penentu (*exogeneous*) yang diperkirakan mempengaruhi besaran PAD dimasukkan ke dalam model untuk memperkirakan masing-masing komponen PAD, seperti pajak dan retribusi daerah. Selanjutnya berdasarkan komponen PAD tersebut dibuat perkiraan total PAD menggunakan persamaan simultan. Untuk memperkirakan pendapatan daerah secara keseluruhan, dilakukan pula estimasi untuk komponen lainnya yaitu Dana Perimbangan yang terdiri dari Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak serta Dana Alokasi Umum.

Ada tiga variabel bebas (*exogeneous*) yang dimasukkan dalam skenario pada model tersebut, yaitu pertumbuhan ekonomi, laju inflasi dan kurs rupiah terhadap dolar Amerika, seperti dapat dilihat pada Tabel 7.1. Skenario yang dipilih dalam menentukan perkiraan pendapatan daerah adalah dengan asumsi pertumbuhan ekonomi 5,20 persen, inflasi 6,0 persen dan kurs rupiah terhadap dolar Amerika Rp 8.650,- (delapan ribu enam ratus lima puluh rupiah). Alasan memilih asumsi tersebut adalah karena besaran-besarannya sangat wajar, dan sangat dekat dengan skenario nasional yang dibuat untuk kepentingan APBN.

Tabel 7.1. Asumsi Dasar Perhitungan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Tahun 2005

Uraian	2003	2004	2005	2005 (nasional)
PDRB, harga berlaku (triliun rp)	281,61	312,98	347,64	2.190,8
Pertumbuhan ekonomi (persen)	4,39	4,70	5,20	5,40
Inflasi (persen)	5,78	6,50	6,00	5,50
Kurs Rp/US\$	8.465	8.700	8.650	8.600

Dari hasil simulasi (Tabel 7.1.) diperkirakan PAD 2005 akan naik 22,12 persen dari angka penetapan tahun 2004 dan Dana Perimbangan naik 12,77 persen, sehingga keseluruhan pendapatan meningkat 17,72 persen. Sementara itu, jika dibandingkan dengan angka perubahan tahun 2004, PAD naik 8,23 persen dan Dana Perimbangan naik 5,19 persen, sehingga keseluruhan pendapatan naik 6,94 persen. Dengan demikian PAD tetap menjadi sumber utama penerimaan daerah yang sangat menentukan bagi Pemerintah Propinsi DKI Jakarta dalam mendukung pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Dengan alokasi anggaran yang optimal dan efisien diharapkan APBD akan mampu memberikan stimulus lebih besar bagi pertumbuhan ekonomi dengan perbaikan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 7.2 menyajikan secara rinci target pendapatan daerah tahun 2005, dimana komponen PAD memiliki porsi paling besar yaitu Rp 6.639,2 milyar (enam triliun enam ratus tiga puluh sembilan milyar dua ratus juta rupiah), sementara Dana Perimbangan sebesar Rp 4.944,8 milyar (empat triliun sembilan ratus empat puluh empat milyar delapan ratus juta rupiah). Sumber PAD tertinggi diperoleh dari pajak daerah sebesar Rp 5.726,2 milyar (lima triliun tujuh ratus dua puluh enam

milyar dua ratus juta rupiah). Sedangkan komponen lainnya yang kenaikannya tidak terlalu signifikan adalah retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan lain-lain pendapatan masing-masing Rp 401,7 milyar (empat ratus satu milyar tujuh ratus juta rupiah), Rp 103,4 milyar (seratus tiga milyar empat ratus juta rupiah) dan Rp 407,9 milyar (empat ratus tujuh milyar sembilan ratus juta rupiah).

Sementara itu untuk Dana Perimbangan, sumber terbesar berasal dari bagi hasil pajak dan bukan pajak sebesar Rp 4.178,4 milyar (empat triliun seratus tujuh puluh delapan milyar empat ratus juta rupiah) . Komponen ini terdiri Pajak Bumi dan Bangunan, Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, Pajak Penghasilan Perorangan dan BP PBB. Sedangkan DAU yang merupakan alokasi dari pemerintah pusat nilainya tidak berubah dibanding angka tahun 2004 yaitu sebesar Rp 766,4 milyar (tujuh ratus enam puluh enam milyar empat ratus juta rupiah). Untuk sumber pendapatan yang terakhir, yaitu Lain-Lain Pendapatan Yang Sah mencapai Rp 192,3 milyar (seratus sembilan puluh dua milyar tiga ratus juta rupiah) atau meningkat sebesar 8,8 persen dibandingkan angka perubahan tahun 2004 atau 5,7 persen dibanding angka penetapan tahun 2004.

Tabel 7.2. Rencana Pendapatan Tahun 2004 dan
Perkiraan Tahun 2005, (Milyar rupiah)

SUMBER PENDAPATAN	APBD 2004		2005 (Perkiraan)		
	Penetapan	Perubahan	Nilai	Kenaikan thd	
				Penetapan (persen)	Perubahan (persen)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PAD	5.436,6	6.134,7	6.639,2	22,12	8,23
Pajak Daerah	4.595,8	5.286,0	5.726,2	24,60	8,33
Retribusi Daerah	368,6	382,1	401,7	8,98	5,13
Hasil Perusahaan Milik Daerah	93,8	102,4	103,4	10,23	0,98
Lain-lain Pendapatan	378,5	364,0	407,9	7,77	12,06
Dana Perimbangan	4.385,0	4.701,0	4.944,8	12,77	5,19
Bahi Hasil	3.615,0	3.934,6	4.178,4	15,59	6,20
Dana Alokasi Umum	770,0	766,4	766,4	-0,47	0,00
Dana Alokasi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-Lain Pendapatan	181,9	176,7	192,3	5,72	8,83
Pendapatan Daerah	10.003,5	11.012,3	11.776,3	17,72	6,94

B. Plafon Belanja Daerah

Pada dasarnya ada tiga komponen dasar dalam struktur belanja daerah yang dibahas dalam Reperetada 2005 ini, yaitu belanja tetap (*fixed cost*), belanja prioritas utama (*dedicated program*), dan belanja variabel (*variable cost*). Penetapan plafon belanja bagi ketiga komponen ini merupakan hasil perpaduan antara pendekatan top-down dan bottom-up. Pendekatan top-down diperlukan untuk menjamin terlaksananya program kegiatan skala besar dan prioritas yang merupakan kebutuhan nyata masyarakat DKI Jakarta, bersifat menyeluruh dan mendesak. Sedangkan pendekatan bottom-up diperlukan untuk dapat menampung

sebanyak-banyaknya aspirasi dan kebutuhan riil masyarakat dalam skala mikro dan spasial (di tingkat kelurahan).

1. Belanja Tetap

Belanja tetap (fixed cost) adalah jenis-jenis belanja yang menurut penggolongannya bersifat wajib dan mendasar bagi berlangsungnya penyelenggaraan administrasi pemerintahan daerah. Konsep belanja tetap adalah kebutuhan biaya minimum bagi berlangsungnya kegiatan suatu kantor (*minimum cost requirement*), yaitu terdiri dari: belanja pegawai, telepon, air dan listrik (TAL), serta pemeliharaan bangunan dan inventaris. Belanja tetap 2005 adalah Rp 4.372,85 milyar (empat triliun tiga ratus tujuh puluh dua milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah), dengan rincian:

- a. Belanja pegawai, sebesar Rp 3.667,39 milyar (tiga triliun enam ratus enam puluh tujuh milyar tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) dialokasikan untuk membayar gaji, tunjangan dan uang kesra bagi sekitar 100.000 pegawai dan guru. Berdasarkan angka tahun 2004, uang kesra untuk guru adalah Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), terdiri dari Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kesra dan Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tunjangan khusus, sedangkan pegawai non-guru hanya menerima uang kesra Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Dalam besaran belanja pegawai tersebut juga sudah diperhitungkan kenaikan 5 persen.
- b. Belanja TAL, dialokasikan sebesar Rp 274,93 milyar (dua ratus tujuh puluh empat milyar sembilan ratus tiga puluh juta rupiah) termasuk perkiraan kenaikan 5 persen untuk tahun 2005.
- c. Belanja pemeliharaan, dialokasikan sebesar Rp 430,53 milyar (empat ratus ratus tiga puluh milyar lima ratus tiga puluh juta rupiah) untuk perbaikan dan pemeliharaan tanah dan bangunan, kendaraan dinas, perangkat komputer dan perlengkapan kantor.

2. Belanja Prioritas Utama (*Dedicated Program*)

Terdapat 13 jenis program kegiatan yang dikategorikan ke dalam belanja prioritas Utama (*dedicated program*), dengan nilai plafon tahun 2005 sebesar Rp 2.818 milyar (dua triliun delapan ratus delapan belas milyar rupiah) yaitu:

- a. Banjir Kanal Timur, sebesar Rp 450 milyar (empat ratus lima puluh milyar rupiah), didasarkan pada pertimbangan bahwa kebutuhan biaya keseluruhan (2002-2007) adalah Rp 4,99 triliun (empat triliun sembilan ratus sembilan puluh milyar rupiah), berupa pembebasan tanah yang harus ditanggung Pemda sebesar Rp 2,47 triliun (dua triliun empat ratus tujuh puluh milyar rupiah) dan pembangunan fisik oleh Pemerintah Pusat sebesar Rp 2,52 triliun (dua triliun lima ratus dua puluh milyar rupiah). Kebutuhan pembebasan tanah adalah 401,2 ha, sampai dengan tahun 2003 diperkirakan baru dibebaskan 22,5 ha dan pada tahun 2004 diperkirakan 13,5 ha yang akan terbebaskan. Seluas 101 ha lahan fasum merupakan kewajiban para pengembang yang harus diserahkan ke Pemerintah Propinsi DKI Jakarta, sehingga sisa yang harus dibebaskan pada tahun 2005-2007 seluas sekitar 264,2 ha dengan nilai Rp 2,34 triliun (dua triliun tiga ratus empat puluh milyar rupiah). Kebutuhan biaya dialokasikan Rp 450 milyar (empat ratus lima puluh milyar rupiah) untuk tahun 2005, Rp 950 milyar (sembilan ratus lima puluh milyar rupiah) tahun 2006 dan Rp 942 milyar (sembilan ratus empat puluh dua milyar rupiah) tahun 2007.
- b. Rumah susun (Rusun), sebesar Rp 150 milyar (seratus lima puluh milyar rupiah), didasarkan pada tujuan untuk menyediakan perumahan rakyat yang sederhana, murah dan sehat, sebanyak 2.000 unit dengan harga rata-rata Rp 75 juta (tujuh puluh lima juta rupiah) per unit (30 m², 2 KT, 1 KM). Penyediaan rumah ini juga dimaksudkan sebagai bagian dari upaya penertiban dan penataan permukiman kota, terutama yang sekarang masih berdiam di hunian kumuh dan bangunan bantaran kali. Hingga tahun 2007 direncanakan dibangun 6.000 unit (2.000 unit per tahun) dengan system turn

key. Hal ini dimaksudkan untuk menambah jumlah rusun existing yang telah dibangun Pemda hingga tahun 2004 sebanyak 7.616 unit dan pihak lain 1.780 unit. Dari data hasil survei, sebenarnya kebutuhan Rusun untuk mengatasi permukiman kumuh mencapai 60.035 unit sehingga perlu dikaji lebih lanjut.

- c. Busway, sebesar Rp 515 milyar (lima ratus lima belas milyar rupiah), didasarkan pada pertimbangan bahwa kebutuhan terhadap tersedianya angkutan massal yang aman, nyaman dan terjangkau sudah sangat mendesak mengingat semakin menurunnya kondisi lalu lintas di kota Jakarta. Sesuai Pola Transportasi Makro (PTM) Propinsi DKI Jakarta yang telah direncanakan secara terintegrasi yaitu Busway, Monorail dan Subway pada tahun 2003-2004 telah diselesaikan Busway koridor I (Blok M-Kota) dari rencana keseluruhan 13 koridor. Sedangkan di tahun 2005 akan diselesaikan Busway koridor II (Pulogadung - Harmoni) dan Busway koridor III (Harmoni - Kali Deres), dengan perkiraan biaya Rp 465 milyar (empat ratus enam puluh lima milyar rupiah) dan pengadaan 50 bus feeder sebesar Rp 50 milyar (lima puluh milyar rupiah). Disamping itu juga disiapkan *detail engineering* terhadap Busway koridor IV-XIII. Sehingga pada tahun 2007 direncanakan Busway sampai dengan Busway koridor XIII dapat direalisasikan.
- d. Flyover dan Underpass (FO/UP), sebesar Rp 153,5 milyar (seratus lima puluh tiga milyar lima ratus juta rupiah), didasarkan pada rencana menyelesaikan pembangunan underpass Pasar Minggu/rel Kereta Api sebesar Rp 98,5 milyar (sembilan puluh delapan milyar lima ratus juta rupiah), pembangunan awal flyover Martadinata dan underpass Kebayoran Lama sebesar Rp 22 milyar (dua puluh dua milyar rupiah) dan Jalan Layang Roxy sebesar Rp 33 milyar (tiga puluh tiga milyar rupiah), yang disiapkan bagi jalan tol dalam kota. Target sampai dengan akhir tahun 2007 adalah 17 FO/UP (4 bersumber dari APBN/Kimpraswil dan 13 bersumber dari APBD/Pemerintah Propinsi DKI Jakarta).

- e. Rehab total gedung sekolah didasarkan pada pertimbangan bahwa terdapat sejumlah SDN, SMPN dan SMAN/SMKN yang dikategorikan rawan ambruk, tahun 2005 di alokasikan anggaran sebesar Rp. 200 milyar (dua ratus milyar rupiah) yang akan diselesaikan secara berkala sesuai dengan prioritas dan urgensinya. Meskipun seharusnya rehabilitasi didasarkan pada hasil appraisal terhadap kondisi gedung-gedung sekolah dan Master Plan gedung-gedung sekolah yang kegiatannya akan diselesaikan tahun 2004.
- f. Kali Angke, Ciliwung dan Situ, sebesar Rp 401,5 milyar (empat ratus satu milyar lima ratus juta rupiah), didasarkan pada keinginan kuat Pemda untuk mewujudkan kali dan situ yang tertata baik dan sehat serta mampu menjalankan fungsinya bagi lingkungan kehidupan kota. Pilihan prioritas pada Kali Angke karena kali ini berada di lini depan pintu gerbang internasional yaitu Bandara Soekarno-Hatta, dengan biaya yang diperkirakan sebesar Rp 151,5 milyar (seratus lima puluh satu milyar lima ratus juta rupiah). Pilihan prioritas pada Kali Ciliwung adalah karena kali ini mengalir membelah kota Jakarta dan dalam upaya meningkatkan kemampuannya sebagai sumber air baku dengan biaya yang diperlukan Rp 100 milyar (seratus milyar rupiah). Sedangkan pelestarian Situ yang berfungsi sebagai reservoir air, memerlukan biaya Rp 150 milyar (seratus lima puluh milyar rupiah).
- g. **Penerapan teknologi untuk pengolahan dan pemanfaatan sampah berskala besar**, dialokasikan sebesar Rp 400 milyar (empat ratus milyar rupiah) didasarkan pada pertimbangan bahwa sampah telah menjadi permasalahan kota Jakarta yang semakin serius. Hampir semua Tempat Pembuangan Akhir (TPA) seperti Bantar Gebang dan Bojong memunculkan masalah antara lain resistensi masyarakat lokal yang semakin keras (alasan lingkungan). Pilihan pada teknologi sanitary land-fill yang ada sekarang ini kurang efektif karena proses pemisahan sampah tidak bekerja baik, dianggap tidak cocok untuk diterapkan di Kota Jakarta seperti juga di kebanyakan negara maju. Di sisi lain, dalam kurun waktu 2001-2004 telah diupayakan kerjasama dengan pihak swasta dalam pengelolaan sampah. Dalam kurun

waktu tersebut, telah lebih dari 80 perusahaan swasta mengajukan proposal kerjasama, dengan sistem pengolahan mencakup sanitary landfill, komposting, pembuatan pupuk, daur ulang dan incinerator skala besar. Pada tahun 2002 terealisasi 3 MOU, namun pembangunannya tidak terealisasi karena kesulitan pendanaan. Selanjutnya pada tahun 2003 terealisasi 6 MOU dan 4 PKS, dimana yang terwujud hanya TPST Bojong, namun belum dapat beroperasi. Pada tahun 2004 baru terealisasi 1 PKS di TPA Bantar Gebang, dan belum terealisasi satupun pengolahan sampah dengan teknologi tinggi, yang dikerjasamakan dengan pihak swasta. Sampai dengan tahun 2007 direncanakan dibangun pengolahan sampah dengan teknologi yang berskala besar dan ramah lingkungan dengan total kapasitas 2.000 ton perhari.

- h. PPMK, sebesar Rp 267 milyar (dua ratus enam puluh tujuh milyar rupiah), dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun ketahanan sosial-ekonominya secara mandiri, sehingga dapat mewujudkan suatu civil society yang lebih nyata. Penyediaan dana bagi masyarakat untuk mengelola kepentingannya secara langsung dan bertanggung jawab, akan menciptakan suatu keseimbangan yang sehat dan dinamis antara peran pemerintah dan masyarakat itu sendiri dalam ikut mengelola pembangunan dan peningkatan kesejahteraan. Dana berupa block-grant ini akan dialokasikan secara proporsional disesuaikan dengan kondisi dan potensi masing-masing Kelurahan.
- i. Peningkatan Kemampuan Kelurahan, sebesar RP 50 milyar (lima puluh milyar rupiah), dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan dan peran kelurahan dalam ikut mengelola pelayanan masyarakat secara langsung dan lebih bertanggung jawab. Program ini sebagai upaya untuk membuat keseimbangan dinamis antara peran masyarakat dan lurah dalam membangun ketahanan sosial-ekonomi di tingkat kelurahan. Pemberian dana ini juga dalam rangka pendelegasian wewenang kepada kelurahan untuk mengelola empat urusan: kebersihan, ketertiban, kependudukan dan kesehatan masyarakat, agar pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih

dekat dan memenuhi tingkat pelayanan yang lebih baik. Dana ini diberikan pada 50 kelurahan sebagai pilot project.

- j. Peningkatan kemampuan Kecamatan, sebesar Rp 10 milyar (sepuluh milyar rupiah), diberikan pada 10 Kecamatan sebagai pilot project, dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan kinerja Kecamatan, baik dalam menjalankan fungsi koordinasi pelayanan bagi Kelurahan-kelurahan di bawahnya, maupun dalam mengisi fungsi pelayanan yang menjadi wewenangnya. Penyediaan dana ini juga dimaksudkan agar tercipta keseimbangan kemampuan dan peran antara Kecamatan, Kelurahan dan masyarakat.
- k. Tambahan Kesra Guru, Paramedis dan Pegawai, sebesar Rp 109,90 milyar (seratus sembilan milyar sembilan ratus juta rupiah), dimaksudkan sebagai upaya terus menerus Pemda dalam memperbaiki kesejahteraan para guru, paramedis dan pegawai dibarengi dengan keharusan pegawai untuk mampu meningkatkan produktivitas dan kinerjanya, sekaligus upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih (good governance). Tambahan kesra direncanakan sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) per pegawai, sehingga untuk tahun 2005, guru dan paramedis memperoleh kesra dan tunjangan sebesar Rp 1 juta (satu juta rupiah) per-bulan dan pegawai memperoleh kesra Rp 700 ribu (tujuh ratus ribu rupiah) per-bulan.
- l. Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta sebesar Rp 61,23 milyar (enam puluh satu milyar dua ratus tiga puluh juta rupiah), dimaksudkan sebagai upaya untuk membangun pusat keislaman yang besar sebagai pusat kegiatan dan pustaka ilmu keislaman. Pada tahun 2001 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 17,35 milyar (tujuh belas milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang digunakan untuk penyusunan Master Plan dan Pondasi Masjid. Setahun kemudian dialokasikan sebesar Rp 122 milyar (seratus dua puluh dua milyar rupiah) untuk lanjutan pembangunan mesjid, pemagaran, pematangan halaman dan pembangunan pintu gerbang. Selanjutnya pada

tahun 2003 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 19,5 milyar (sembilan belas milyar lima ratus juta rupiah) untuk finishing pembangunan mesjid, pembangunan lapangan olahraga dan pembangunan rumah dinas imam. Tahun 2004 dilakukan pekerjaan pembuatan ME dan DE Gedung Diklat (Perancangan Arsitektur) dengan anggaran Rp 1,25 milyar (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah).

- m. Penghijauan sebesar Rp 50 milyar (lima puluh milyar rupiah) didasarkan pada kebutuhan pelayanan untuk menghadirkan kenyamanan lingkungan perkotaan yang dinilai sangat strategis dalam meningkatkan citra ibukota Jakarta, melalui penataan dan pengindahan infrastruktur perkotaan khususnya pertamanan. Hingga akhir tahun anggaran 2004 akan tertangani lahan pertamanan seluas 1.161 ha, dan pada akhir tahun anggaran 2007 ditargetkan penataan taman seluas 2000 ha, sehingga mulai tahun anggaran 2005 luas taman akan mencapai diatas 100 ha pertahun, dengan prioritas kawasan yang bernilai strategis.

3. Belanja Variabel (Variabel Cost)

Belanja Variabel (variable cost) adalah jenis-jenis belanja yang dikelola oleh unit kerja dan menurut fungsinya digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan dan program yang ditetapkan/ditargetkan unit masing-masing. Belanja Variabel untuk tahun 2005 dialokasikan sebesar Rp 5.881 milyar (lima triliun delapan ratus delapan puluh satu milyar rupiah) atau 42,5 persen dari total belanja. Pada perencanaan APBD nantinya, belanja variabel ini akan dialokasikan lebih lanjut menjadi plafon unit kerja sesuai dengan bidang, fungsi, program dan kegiatan masing-masing.

C. Plafon Pembiayaan Daerah

Seperti telah diuraikan dalam bab sebelumnya mengenai kebijakan pembiayaan daerah, sumber penerimaan daerah diperoleh dari sisa lebih tahun lalu berupa sisa penyerapan anggaran tahun 2004 dan transfer dana cadangan daerah (DCD), sedangkan pengeluaran daerah berupa pembayaran hutang pokok yang jatuh tempo dan penyertaan modal pemerintah. Sementara itu, pembiayaan melalui penjualan obligasi pemerintah dan saham BUMD baru akan dikaji, dan bila dinilai layak akan direalisasikan pada tahun 2006.

Jumlah penerimaan daerah tahun 2005 mencapai Rp 2.152,94 milyar (dua triliun seratus lima puluh dua milyar sembilan ratus empat puluh juta rupiah) yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Berdasarkan pelaksanaan APBD 2004, diperoleh penyerapan belanja sampai dengan bulan Juni 2004 sebesar 27,42 persen. Dengan menggunakan analisis kurva S, diperoleh perkiraan penyerapan belanja sampai dengan Desember 2004 sebesar 85 persen, sehingga sisa lebih dari penyerapan belanja diperkirakan mencapai Rp 1.902,94 milyar (satu triliun sembilan ratus dua milyar sembilan ratus empat puluh juta rupiah) atau 15 persen dari total belanja. Dari kajian tersebut diperkirakan realisasi pendapatan tidak akan melampaui rencana (perubahan). Dengan demikian sisa lebih pada tahun 2005 ini hanya berasal dari sisa penyerapan belanja.
2. Sumber penerimaan lainnya yaitu; penggunaan DCD yang direncanakan sebesar Rp 250,00 milyar (dua ratus lima puluh milyar rupiah). Hasil penghitungan ini didasarkan pada kondisi bahwa DCD bulan September 2004 sebesar Rp 877,95 milyar (delapan ratus tujuh puluh tujuh milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah), jika disimpan dengan bunga 0,6 persen per bulan, maka DCD yang dihasilkan hingga Desember 2004 menjadi Rp 879,35 milyar (delapan ratus tujuh puluh sembilan milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah). Jika DCD minimal yang harus disimpan adalah 5 persen dari perubahan APBD 2004, dalam hal ini sebesar Rp 634,32 milyar (enam ratus tiga puluh empat milyar tiga

ratus dua puluh juta rupiah), maka penggunaan DCD tahun 2005 sebesar 250 milyar (dua ratus lima puluh milyar rupiah) masih dalam batas aman, dengan tetap mempertimbangkan Perda No. 10 Tahun 1999.

Sementara itu pengeluaran daerah dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pembayaran utang pokok sebesar Rp 40,0 milyar (empat puluh milyar rupiah)
2. Penyertaan modal sebesar Rp 50 milyar (lima puluh milyar rupiah)

Dari perhitungan diatas, jumlah pembiayaan daerah mencapai Rp 2.062,94 milyar (dua triliun enam puluh dua milyar sembilan ratus empat puluh juta rupiah), yang merupakan selisih antara jumlah penerimaan daerah Rp 2.152,94 milyar (dua triliun seratus lima puluh dua milyar sembilan ratus empat puluh rupiah) dengan jumlah pengeluaran daerah Rp 90 milyar (sembilan puluh milyar rupiah).

Tabel 7.4. IKHTISAR APBD 2005 (Milyar Rp)

URAIAN	2004 Penetapan (Milyar Rp)	2004 Perubahan (Milyar Rp)	Perkiraan 2005		
			Nilai (Milyar Rp)	Kenaikan thd Peneta- pan (persen)	Kenaikan thd Perubah- an (persen)
I. PENDAPATAN	10.003,67	11.012,20	11.776,30	17,72	6,94
I.1. Pendapatan Asli Daerah	5.436,75	6.134,56	6.639,20	22,12	8,23
I.2. Dana Perimbangan	4.385,05	4.701,0	4.944,80	12,76	5,19
I.3. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	181,87	176,7	192,30	5,73	8,80
II. BELANJA	12.203,35	12.631,05	13.839,24	13,41	9,57
2.1. Program Prioritas Gub- Went	1.243,00	1.243,00	2.693,13	116,66	116,66
2.2. Fixed Cost	4.412,77	5.094,00	6.773,25	3,45	7,53
2.3. Variabel Cost	6.547,57	6.299,05	4.372,85	-0,90	16,49
DEFISIT	2.199,70	1.618,85	2.062,94	-6,22	27,43
III. PEMBIAYAAN					
3.1. Sumber Penerimaan Daerah	2.254,94	1.674,00	2.152,94	-4,52	28,61
- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu	2.254,94	1.674,00	1.902,94	-15,61	13,68
- Transfer dari Dana Cadangan	-	-	250,00	-	-
3.2. Sumber Pengeluaran Daerah	55,27	55,27	90,00	62,84	62,84
- Penyertaan Modal	44,46	44,46	50,00	12,46	12,46
- Pembayaran Utang Pokok yang Jatuh Tempo	10,81	10,81	40,00	270,03	270,03
TOTAL APBD	12.258,61	12.686,20	13.929,24	13,63	9,80